

UPAYA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KELURAHAN

Amron Rehi Ranjamandu

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: ambronrehi@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian yakni; 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa/kelurahan, yang bertugas membantu pemerintah desa/ kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. 2) Partisipasi Masyarakat, Keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan aktif dalam menentukan pilihan dan mengontrol lingkungannya. 3) Pembangunan, Proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik yang dialami oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tlogomas sudah cukup baik, hal ini karena upaya yang dilakukan oleh LPMK sebagai salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun masih ada beberapa faktor yang menghambat LPMK dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Tlogomas.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemberdayaan, Masyarakat

Abstract: *The purpose of this study was to determine the efforts of the Village Community Empowerment Institution in increasing community participation in the development in Kelurahan and know the supporting factors and inhibiting community participation in developing Kelurahan. This study was conducted at the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in Kelurahan Tlogomas, Malang Lowokwaru District. This study used qualitative research approach, with the focus of research were; 1) Village Community Empowerment Institutions (LPMK), Community Institutions established by village / kelurahan regulations, which are tasked with help to help the village / kelurahan government and are partners in empowering the community. 2) Community Participation, Community participation or active involvement in determining the choice and controlling the environment. 3) Development, The process of changing from a certain condition to a better condition of the community. The results showed that the community participation in the development of Kelurahan Tlogomas categorized as good enough; this was due to the efforts made by LPMK as one of the community empowerment institutions that had carried out their duties and functions well, although there were still several factors that inhibited LPMK to increase the community participation in Kelurahan Tlogomas.*

Keywords: *Participation, Community, Empowerment*

PENDAHULUAN

Pada umumnya pembangunan suatu negara dilaksanakan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini berada dalam proses pembangunan, yang bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan bangsa Indonesia

terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Agar tercapai tujuan seperti yang dimaksud diatas, maka negara membentuk organisasi yang bernama Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan negara untuk merencanakan, menetapkan tujuan dan sasaran.

Dengan melihat dari apa yang dikemukakan diatas, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan otonomi (UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008) khususnya ditingkat kelurahan (PP No.73 Tahun 2005) yaitu perlu meningkatkan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik di kota maupun didesa agar dapat mengambil bagian alam program pembangunan untuk terlaksananya pelaksanaan otonomi daerah yang mantap dan berkelanjutan.

Salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan lembaga kemasyarakatan yaitu lewat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dalam fungsinya lembaga ini telah membantu pemerintah kelurahan pada perencanaan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, sedangkan pemerintah kelurahan memiliki peranan dan membina hubungan kerjasama yang baik. Hubungan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan kelembagaan yang ada haruslah bersifat saling mengisi, tanpa adanya intervensi dari masing-masing. Dasar pembentukan LPM merujuk pada PerMendagri No. 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) adalah merupakan partner atau mitra kerja pemerintah pada pasal 8 menyebutkan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Kelurahan mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), perlu melakukan strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berawal dari terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang pada akhirnya membuat kesepakatan untuk mengadakan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000, yaitu untuk menyelenggarakan musyawarah yang diikuti seluruh perwakilan LKMD seluruh Indonesia, dan kemudian mengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM), dan resmi di deklarasikan pada tanggal 21 juli 2000. Hasil musyawarah forum temu LKMD tingkat nasional tersebut, terjadilah kesepakatan nasional yang deikenal dengan “Deklarasi Bandung” yang memuat dua hal yang fundamental yakni:

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. Dengan terbentuknya asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dari uraian di atas, dapat dilihat kaitan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan partisipasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan yaitu bahwa LPMK mempunyai peran sangat besar yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya mengenai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan.

Kelurahan Tlogomas merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kelura ini terdiri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 49 RT (Rukun Tetangga). Batas-batas Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru yaitu sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Sebelah timur berbatasan dengan

Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kantor Kelurahan, Tlogomas Kecamatan Lowokwaru beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 56.

Sebelum tahun 1987, Tlogomas merupakan bagian dari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur, Pada tahun 1987, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kota Malang mengalami perluasan wilayah. Desa Tlogomas menjadi bagian dari Kota Malang. Berikutnya pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, Desa Tlogomas berubah menjadi Kelurahan Tlogomas.

Di Kelurahan Tlogomas selain memiliki kelembagaan seperti PKK, BKM, dan KIM, juga memiliki kelembagaan fungsional lain yang dibentuk dibawah naungan pemerintah kelurahan langsung, yang berperan memajukan kualitas masyarakat Kelurahan Tlogomas, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Lembaga ini adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Banyak makna yang dimaksud dalam LPMK ini, diantaranya:

1. Mitra kerja pemerintah yakni mengembangkan proses kesejahteraan yang saling terbuka, bertanggung jawab, demokratis, dan jujur antara LPMK dan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta memberikan masukan-masukan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemberdayaan masyarakat; proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemberian tanggung jawab, peran dan kesempatan dalam keikutsertaan masyarakat pada proses pemerintahan dan pembangunan.
3. Kesejahteraan masyarakat: manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan masyarakat terutama dalam pelayanan yang memenuhi rasa keadilan, proses kemandirian, perubahan taraf hidup yang lebih manusiawi.

Seperti halnya di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sejauh ini pelaksanaan LPM sebagai mitra dari lurah didalam sistem pemerintahan kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik. Masih ada program-program pembangunan berbasis pemberdayaan yang belum terlaksana secara optimal, bahkan ada yang sudah dilaksanakan tetapi tidak menunjukkan kualitas yang baik. Ini menekankan fungsi pemberdayaan yang menjadi tanggung jawab LPM bersama Pemerintahan kelurahan yang belum terlaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab LPM itu sendiri.

Dilihat dari masalah-masalah dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ada di kelurahan Tlogomas, maka perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang optimal lewat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif , (Meleong 2006) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah. Fokus Penelitian yaitu: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa/kelurahan, yang bertugas membantu pemerintah desa/kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat; 2) Partisipasi Masyarakat, Keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan aktif dalam menentukan pilihan dan mengontrol lingkungannya; 3) Pembangunan, Proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik yang dialami oleh masyarakat. Penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011), *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana seorang peneliti beraktifitas untuk menangkap, memahami keadaan atau fenomena yang sebenarnya. Dengan demikian yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Proses analisa data ini diawali dengan menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan latar ilmiah, yang disampaikan cara penyusunan sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata terkumpul dalam aneka cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi); 2) Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan mentransformasikan data kasar yang ada dalam catatan-catatan yang ditulis di lapangan; 3) Penyajian data, sebagai kesimpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

PEMBAHASAN

Upaya LPMK Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan

Dalam peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh LPMK tentu ada beberapa upaya yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh LPMK itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (Mardikanto dan Soebiato, 2015) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan bahwa adanya 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin dengan dimensi sebagai berikut:

1. Motivasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya tindakan memotivasi masyarakat dan lingkungannya untuk terlibat langsung dan aktif dalam program partisipasi masyarakat sudah dilakukan di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, memotivasi masyarakat dilakukan melalui kunjungan-kunjungan langsung kepada setiap lingkungan serta melakukan silaturahmi dengan masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam mengarahkan, mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sebuah partisipasi masyarakat dalam suatu pelaksanaan pembangunan.

2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tindakan peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan baik itu pada kinerja perangkat ataupun masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah dilakukan dengan baik, tindakan peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dengan mengundangnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh

lembaga terkait, sehingga mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan-kegiatan.

3. Manajemen Diri

Berdasarkan hasil penelitian, dalam upaya untuk memandirikan dan membangun kemampuan guna untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang belum optimal. Meskipun sudah diberikan informasi-informasi yang dapat bermanfaat bagi kemajuan kehidupan masyarakat yaitu melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan mengenai suatu hal atau tema.

4. Mobilisasi sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa lembaga terkait sudah melakukan tindakan memobilisasi sumber daya yaitu melalui pemberian pemahaman dan mendorong masyarakat untuk menyadari hak dan kewajibannya untuk melakukan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan.

5. Pembangunan dan pengembangan jaringan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pembangunan dan pengembangan jaringan di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang belum cukup baik, terlihat dari kinerja dari lembaga terkait dalam menggerakkan ataupun memberikan informasi-informasi secara merata kepada masyarakat mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, dapat dikatakan bahwa sudah cukup baik, karena berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan guna memberdayakan masyarakat di lingkungan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hal ini juga dilihat dari fungsi LPMK yang sudah dijalankan oleh pihak LPMK Kelurahan Tlogomas, sebagai mana disebutkan dalam Permendagri No 5 Tahun 2007 pasal 4 ayat 2 yaitu:

1. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak LPMK kelurahan Tlogomas sudah menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yaitu lewat sosialisasi, pertemuan-pertemuan tingkat RT/RW dalam rangka memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan di lingkungan sekitar mereka dan yang menjadi kebutuhan mereka. Pihak LPMK menampung dan kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut lewat musrembang di tingkat kelurahan.

2. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pihak LPMK ikut serta membantu Pemerintah Kelurahan dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan cara membantu menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan yang ada dalam lingkup kelurahan Tlogomas. Pihak LPMK juga mengadakan pendekatan kepada masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam perencanaan sampai pada evaluasi dan pemanfaatan pembangunan di Kelurahan Tlogomas.

3. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

Pihak LPMK ikut serta membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di kelurahan Tlogomas. Pihak LPMK mengadakan pendekatan kepada masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam perencanaan sampai pada evaluasi dan pemanfaatan pembangunan di Kelurahan Tlogomas secara partisipatif.

4. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
Pihak LPMK menjalankan fungsinya sebagai penumbuh kembang dan penggerak prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat kelurahan Tlogomas, yaitu dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman dan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya program pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di kelurahan.
5. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.
Pihak LPMK menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup lewat kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di lingkungan sekitar kelurahan Tlogomas.
6. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
Pihak LPMK mengadakan pengembangan kreatifitas dengan mengadakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan juga membantu pemerintah kelurahan dalam mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obat terlarang bagi remaja lewat sosialisasi-sosialisasi baik di tingkat RT/RW maupun sekolah dan perguruan tinggi yang ada di sekitar kelurahan Tlogomas.
7. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
Pemberdayaan dan perlindungan hak politik bagi masyarakat kelurahan Tlogomas juga dilakukan oleh pihak LPMK dengan cara memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas mereka guna memberdayakan masyarakat. Pihak LPMK juga memberikan perlindungan hak politik kepada masyarakat dengan cara mengawal apa yang menjadi hak masyarakat Tlogomas dalam hal politik.
8. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
Pihak LPMK sebagai media komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah kelurahan Tlogomas, dan menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan Logomas.

Tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Tlogomas sejauh ini cukup baik, dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam diskusi-diskusi mengenai perencanaan pembangunan dengan menyumbangkan buah-buah pikiran, ikut serta mengambil bagian dalam pelaksanaan program pembangunan, sampai pada evaluasi dan pemanfaatan pembangunan. Hal ini juga dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan Tlogomas, dan partisipasi swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Soetomo (2008) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu :

1. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk sarana dalam pembangunan.
2. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada

tingkat ini yaitu berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dana memelihara proyek yang telah di bangun.

3. Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian itu dilakukan secara langsung contohnya dengan ikut serta dalam pengawasan dan menilai secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Faktor Pendukung dan Penghambat LPMK Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kelurahan

Dalam upaya LPMK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Selaras dengan pendapat Dorodjatin (dalam Slamet, 2003), bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu:

1. Faktor Pendukung

a. Kemauan

Dari hasil penelitian, dengan adanya sosialisasi- sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LPMK melalui tingkat RT/RW, masyarakat diberikan pemahaman dan motivasi akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan itu sendiri. Maka dengan motivasi yang diberikan kepada masyarakat, timbul kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang diadakan oleh pemerintah baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik.

b. Kemampuan

Adanya kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pihak LPMK itu sendiri yang memberikan bimbingan atau pelatihan kepada masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik.

c. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan pembangunan di wilayah kelurahan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh dalam upaya mendorong masyarakat untuk turut berperan aktif dalam program-program pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Kelurahan tersebut, baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik.

Dilihat dari adanya beberapa faktor pendukung upaya LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, maka partisipasi masyarakat Kelurahan Tlogomas dalam pembangunan akan semakin meningkat, sehingga dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program pembangunan yang ada.

2. Faktor Penghambat

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, diantaranya:

1. Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan-kegiatan masih rendah, disini masih kurangnya pemahaman, kesadaran serta masih adanya rasa ketidakpedulian dari masyarakat.

2. Komunikasi serta kerjasama yang terjalin antara lembaga terkait dengan masyarakat belum optimal dan efektif.
3. Belum optimalnya kinerja dari lembaga terkait dalam menggerakkan ataupun memberikan informasi-informasi secara merata kepada masyarakat mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Dilihat dari beberapa faktor penghambat diatas, sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Kelurahan Togomas. Hal ini perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh, komunikasi serta kerjasama antara lembaga terkait dengan masyarakat perlu ditingkatkan dan peningkatan kinerja lembaga dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diketahui bahwa sudah baik.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, diantaranya masih terbatasnya kemampuan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam memberikan informasi dan penyuluhan mengenai program-program pemberdayaan masyarakat kepada warga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat masih rendah, masih belum efektifnya kegiatan penyuluhan-penyuluhan maupun sosialisasi-sosialisasi yang diadakan di Kelurahan Tlogomas.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor.73 Tahun 2005
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004